

## MANAJEMEN SISTEM INFORMASI DESA (SID) TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN TRANSPARANSI DESA SEPIT

### Village Information System (SID) Management on the Quality of Public Services and Transparency in Sepit Village

Lalu Moh. Fahri<sup>1</sup>, Romi Oriza<sup>2</sup>, Jum'atul Aini<sup>3</sup>, Maulina Intan Fitriani<sup>4</sup>, Dwi Trisna Sekar Nurti<sup>5</sup>

STIT Palapa Nusantara Lombok-NTB

[fahri01@gmail.com](mailto:fahri01@gmail.com)<sup>1</sup>, [romi02@gmail.com](mailto:romi02@gmail.com)<sup>2</sup>, [202300420061mhswastitpn@gmail.com](mailto:202300420061mhswastitpn@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[202300420022mhswastitpn@gmail.com](mailto:202300420022mhswastitpn@gmail.com)<sup>4</sup>, [202300420023mhswastitpn@gmail.com](mailto:202300420023mhswastitpn@gmail.com)<sup>5</sup>

#### Article Info:

Submitted: Apr 26, 2026	Revised: Mei 4, 2026	Accepted: Mei 10, 2026	Published: Jun 1, 2026
----------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------

#### Abstract

*The village is the smallest government unit that has an important role in providing public services to the community. Along with the development of information technology, village governments are required to increase transparency and efficiency of services through the implementation of the Village Information System (SID). This study aims to analyze the influence of Village Information System (SID) management on improving the quality of public services and government transparency in Sepit Village, Keruak District, East Lombok Regency. The background of this study departs from the challenges faced by village governments in managing data and information efficiently and accountably in the digital era, where SID is one strategic solution. This study uses a quantitative approach with descriptive methods and data collection techniques through observation, questionnaires, interviews, and documentation. The results show that SID management plays a positive role in accelerating village administrative services and increasing public access to information. However, SID implementation has not been optimal due to several obstacles such as limited competency of village officials, inadequate technological infrastructure, and low digital literacy among the community. In addition, village transparency through SID is still not optimal due to minimal data updates and a lack of socialization to the community.*

**Keywords:** Village Information System, Information Management, Public Services, Transparency.

**Abstrak:** Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Seiring perkembangan teknologi informasi, pemerintah desa dituntut untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan melalui penerapan Sistem Informasi Desa (SID). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh manajemen Sistem Informasi Desa (SID) terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan transparansi pemerintahan di Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Latar belakang penelitian ini berangkat dari tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam mengelola data dan informasi secara efisien dan akuntabel di era digital, di mana SID menjadi salah satu solusi strategis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, angket, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen SID berperan positif dalam mempercepat pelayanan administrasi desa dan meningkatkan akses informasi masyarakat. Namun demikian, implementasi SID belum optimal karena beberapa kendala seperti keterbatasan kompetensi perangkat desa, infrastruktur teknologi yang belum memadai, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Selain itu, transparansi desa melalui SID masih belum maksimal akibat minimnya pembaruan data dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

**Kata Kunci:** Sistem Informasi Desa, Manajemen Informasi, Pelayanan Publik, Transparansi.

## PENDAHULUAN

Pemerintahan desa memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat lokal (Suterman Nazara et al., 2023) dan (Watrianthos et al., 2019). Desa merupakan unit terdepan dalam mengurus kebutuhan dan aspirasi masyarakat di tingkat pedesaan (Ardianus Laia et al., 2022). Namun, dalam beberapa kasus, tata kelola pemerintahan desa masih menghadapi tantangan dan masalah yang dapat menghambat efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan administrasi dan keuangan desa. Tata kelola pemerintahan desa adalah cara di mana desa dikelola, diatur, dan dioperasikan oleh pemerintah desa (Gulo & Kakisina, 2023) dan (Masri Ayu Ndruru & Eduar Baene, 2022). Pemerintahan desa memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan publik, membangun dan memelihara infrastruktur desa, serta mengelola sumber daya lokal dengan efektif dan efisien (Telaumbanua & Ziliwu, 2022). Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Seiring perkembangan teknologi informasi, pemerintah desa dituntut untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan melalui penerapan Sistem Informasi Desa (SID).

Salah satu masalah umum yang sering ditemui adalah kurangnya pemahaman dan kapasitas pemerintahan desa dalam mengelola administrasi secara efektif (Telaumbanua & Ziliwu, 2022).

Hal ini dapat mengakibatkan kelambatan atau ketidakakuratan dalam proses administratif, seperti pembuatan dan pengarsipan dokumen, pengelolaan data penduduk, dan pelayanan administratif kepada masyarakat .

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Digitalisasi pemerintahan menjadi salah satu agenda strategis nasional yang diarahkan untuk menciptakan tata kelolapemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Wahyiah, 2026).

Desa menjadi garda terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, terutama pelayanan administrasi dasar yang secara langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kualitas tata kelola pemerintahan desa sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah secara keseluruhan (Eprilianto et al., 2020). Dalam praktiknya, pelayanan publik di tingkat desa masih menghadapi berbagai persoalan struktural dan kultural. Prosedur pelayanan yang panjang, ketergantungan pada pelayanan manual, keterbatasan sumber daya aparatur,sertaminimnya transparansi dan akuntabilitas sering kali menjadi keluhan masyarakat. Kondisi ini mendorong perlunya inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik desa, salah satunya melalui penerapan pelayanan publik berbasis digital (Mindarti et al., 2020).

Dalam kerangka SPBE, pelayanan publik berbasis digital diarahkan untukmenciptakan sistem pelayanan yang terintegrasi, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat (Setyaningrum & Wisnaeni, 2019). Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan publik desa tidak dapat dilepaskan dari kualitas tata kelola pemerintahan desa itu sendiri (Wibhisana, 2021).

Dalam era digital saat ini, kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat dan akurat semakin meningkat. Penerapan SID tidak hanya membantu dalam pengelolaan data administrasi desa, tetapi juga mempercepat proses pengambilan keputusan dan pelayanan kepada warga.

Desa Sepit sebagai objek dalam penelitian ini telah mengimplementasikan SID, namun masih terdapat berbagai kendala dalam optimalisasi penggunaannya, baik dari sisi kualitas pelayanan publik maupun keterbukaan informasi kepada masyarakat. Beberapa kendala yang muncul antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memahami teknologi informasi, infrastruktur teknologi yang belum merata, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan SID sebagai sarana transparansi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa teknologi informasi belum sepenuhnya terkelola dengan baik, sehingga belum memberikan dampak optimal bagi kualitas pelayanan maupun keterbukaan informasi kepada publik. Hal ini diperparah dengan masih minimnya literasi digital di

kalangan aparatur dan masyarakat desa. Pengelolaan SID yang tidak terintegrasi dengan sistem kerja pelayanan publik juga menyebabkan informasi yang disajikan tidak selalu akurat dan terkini.

Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa besar pengaruh manajemen SID terhadap kualitas pelayanan publik dan transparansi di desa tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kajian ilmiah yang dapat mengkaji secara mendalam hubungan antara manajemen SID dengan pelayanan dan transparansi pemerintahan desa, sehingga dapat memberikan rekomendasi perbaikan yang konkret bagi Desa Sepit dan desa lainnya yang hendak mengoptimalkan penggunaan SID.

Alasan pemilihan judul ini didasarkan pada urgensi pentingnya menilai efektivitas manajemen SID dalam konteks pemerintahan desa yang transparan dan responsif. Desa Sepit dipilih karena desa ini merupakan salah satu desa yang telah menerapkan SID namun menunjukkan dinamika dalam kualitas pelayanan publik dan transparansi data. Dengan mengkaji secara ilmiah hubungan antara manajemen SID, pelayanan publik, dan transparansi, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi terhadap upaya perbaikan tata kelola pemerintahan desa berbasis teknologi informasi, baik secara lokal di Desa Sepit maupun secara umum di desa-desa lain di Indonesia.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (Sugiyono, 2019). Deskriptif (deskripsi) secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba mencandra suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat (Supardi, 2005). Pada penelitian ini kegiatan yang dilakukan mencari data untuk dapat menggambarkan atau mencandra secara faktual suatu peristiwa atau suatu gejala secara “apa adanya”.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Desa Sepit merupakan salah satu desa yang telah menerapkan Sistem Informasi Desa (SID) dalam pengelolaan administrasi dan pelayanan publik, namun masih menunjukkan dinamika dalam penerapannya yang menarik untuk diteliti. Subjek dalam penelitian ini seluruh perangkat Desa Sepit dan warga masyarakat yang pernah berinteraksi langsung dengan pelayanan publik melalui Sistem Informasi Desa (SID).

Teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan angket dan teknik analisis data menggunakan koefisien korelasi berganda, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

## **HASIL**

### **1. Manajemen Sistem Informasi Desa dalam Kualitas Pelayanan Publik**

Manajerial dan teknis. Jika dilihat dari fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan), terlihat bahwa keempat fungsi tersebut belum berjalan secara sinergis. Misalnya, perencanaan SID belum disusun dalam bentuk dokumen perencanaan yang matang, dan pengawasan terhadap penggunaan SID masih bersifat insidental, bukan bagian dari evaluasi berkala.

Kontribusi SID terhadap kualitas pelayanan publik tampak melalui percepatan proses administrasi dan penyediaan layanan berbasis data. Hal ini sesuai dengan indikator kualitas pelayanan. Keandalan dan ketanggapan. Namun, indikator empati dan jaminan masih belum optimal, karena keterbatasan waktu dan kapasitas perangkat desa dalam memberikan pelayanan yang ramah dan menyeluruh. Masih banyak masyarakat yang belum merasakan manfaat langsung dari digitalisasi layanan karena ketergantungan pada proses manual dan rendahnya pemahaman terhadap penggunaan sistem digital.

Dengan penguatan fungsi manajemen dan dukungan dari berbagai pihak, SID diharapkan dapat menjadi instrumen strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang modern, akuntabel, dan partisipatif.

Sejak kami mulai mengelola Sistem Informasi Desa (SID) secara lebih terstruktur, pelayanan publik di Desa Sepit terasa lebih cepat dan transparan. Warga sekarang bisa mendapatkan informasi administrasi seperti surat keterangan atau data kependudukan dengan lebih mudah karena semua data sudah terdigitalisasi. Kami juga bisa merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih akurat karena data di SID selalu kami perbarui. Bagi kami, SID sangat membantu dalam mengurangi antrean dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan desa.

Pengaruhnya sangat signifikan. Sebelumnya, proses pelayanan masih manual, dan itu sering membuat dokumen tertunda atau salah input. Dengan adanya SID, semua data terpusat dan bisa diakses dengan cepat, jadi pelayanan menjadi lebih efisien. Selain itu, sistem ini memudahkan kami dalam menyusun laporan, mengelola arsip, serta memantau perkembangan program desa. Masyarakat juga merasakan bahwa waktu tunggu mereka jadi lebih singkat dan prosesnya lebih jelas.

Sebagai operator, saya merasakan bahwa manajemen SID membuat pekerjaan jadi lebih sistematis. Kami sudah punya data dasar keluarga, jadi kalau ada yang butuh surat atau layanan, kami tinggal input dan cetak. Proses verifikasi pun jadi lebih cepat karena data sudah tersedia dan terdokumentasi. Masyarakat juga jadi lebih percaya karena mereka bisa melihat langsung proses pembuatan surat atau pelayanan lainnya. Selain itu, dengan sistem yang tertata, kami jadi lebih mudah dalam memberikan pelayanan yang akurat dan cepat.

## **2. Manajemen Sistem Informasi Desa dalam Transparansi Pemerintahan**

Penerapan SID berkontribusi positif terhadap percepatan pelayanan publik, namun keterbatasan infrastruktur dan kompetensi SDM menjadi kendala utama dalam mewujudkan layanan yang responsif dan menyeluruh.

Dalam hal transparansi, meskipun SID sudah menyediakan fitur dan akses informasi publik, realitanya belum banyak masyarakat yang mampu atau terbiasa memanfaatkannya. Faktor rendahnya literasi digital dan kurangnya sosialisasi menjadi faktor penghambat. Secara keseluruhan, terdapat pengaruh positif manajemen SID terhadap kualitas pelayanan dan transparansi desa, namun diperlukan peningkatan kapasitas teknis, regulasi internal, serta pendekatan partisipatif masyarakat agar hasilnya optimal dan berkelanjutan.

Selain faktor internal seperti kompetensi perangkat desa dan kebijakan internal yang belum optimal, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dukungan infrastruktur teknologi informasi menjadi tantangan signifikan. Meskipun Desa Sepit telah memiliki perangkat keras dan jaringan internet, kualitas koneksi yang tidak stabil serta minimnya perawatan perangkat menyebabkan kinerja SID tidak maksimal. Misalnya, saat dilakukan observasi, sistem sempat tidak dapat diakses karena gangguan jaringan yang belum ditangani secara cepat. Hal ini menunjukkan perlunya dukungan teknis yang berkelanjutan agar pelayanan berbasis digital tidak terganggu.

## **3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penerapan SID**

Penggunaan SID belum terintegrasi dengan sistem pelayanan kabupaten. Artinya, meskipun SID di tingkat desa telah digunakan untuk pencatatan data kependudukan atau administrasi lainnya, proses validasi dan pelaporan ke instansi di atasnya masih dilakukan secara manual. Kondisi ini menciptakan duplikasi kerja, serta memperlambat aliran data dan informasi antara desa dan dinas terkait di kabupaten. Hal ini selaras dengan temuan dari penelitian sebelumnya bahwa integrasi lintas sistem merupakan tantangan utama dalam implementasi *e-Government* di daerah.

Masyarakat merasa puas dengan kecepatan pelayanan yang diberikan melalui SID namun mereka masih meragukan akurasi informasi yang tersedia. Hal ini dikarenakan minimnya pembaruan data secara berkala dan kurangnya transparansi terkait aktivitas anggaran desa.

Beberapa warga menyatakan bahwa data kegiatan desa hanya tersedia dalam bentuk fisik atau diumumkan secara lisan di pertemuan warga. Ini menandakan bahwa fitur transparansi yang disediakan SID belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah desa.

Belum adanya mekanisme evaluasi dan pengawasan berkala terhadap pelaksanaan SID. Sistem berjalan tanpa ada audit teknologi atau laporan evaluasi periodik, yang semestinya menjadi dasar untuk perbaikan sistem. Tanpa adanya pengukuran kinerja, akan sulit mengetahui efektivitas jangka panjang dari penggunaan SID terhadap kualitas pelayanan publik dan transparansi desa.

Manajemen SID di Desa Sepit sudah berada di jalur yang tepat namun masih menghadapi berbagai kendala strategis dan operasional. Dibutuhkan kebijakan yang mendukung penguatan kapasitas SDM, penyediaan infrastruktur yang memadai, serta keterlibatan masyarakat yang lebih aktif dalam pemanfaatan sistem. Dengan pendekatan menyeluruh, SID bukan hanya menjadi alat administrasi, tetapi juga pendorong utama tata kelola desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Adanya kesenjangan antara kebijakan desa yang mendukung digitalisasi dengan implementasi di lapangan. Meskipun pemerintah desa telah menyediakan SID dan menetapkan aturan penggunaannya, namun belum ada regulasi internal yang mengatur kewajiban pembaruan data secara berkala oleh setiap perangkat desa. Hal ini menyebabkan inkonsistensi dalam pembaruan informasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem.

Selain itu, masih terdapat perbedaan tingkat pemahaman antara perangkat desa mengenai penggunaan SID. Beberapa perangkat yang lebih muda cenderung lebih cepat beradaptasi dengan teknologi, sedangkan perangkat yang lebih senior mengalami kesulitan dalam mengakses dan mengoperasikan sistem. Hal ini menunjukkan pentingnya pelatihan berkelanjutan dan pendekatan lintas generasi dalam manajemen teknologi informasi desa.

Dari sisi partisipasi masyarakat, kurangnya sosialisasi mengenai manfaat dan cara penggunaan SID menjadi faktor dominan yang membuat pemanfaatan sistem belum optimal. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih mengandalkan layanan tatap muka dan belum mengetahui bahwa sebagian informasi dan layanan administrasi dapat diakses secara online melalui SID. Ini memperkuat temuan bahwa penerapan SID belum didukung oleh strategi komunikasi publik yang efektif.

Dari sisi efisiensi pelayanan, penggunaan SID terbukti mempercepat proses administrasi desa. Namun demikian, kualitas pelayanan masih dipengaruhi oleh faktor-faktor non-teknis seperti sikap petugas, beban kerja, dan keterbatasan waktu. Ini menandakan bahwa teknologi hanyalah salah satu aspek dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, yang tetap harus didukung dengan tata kelola sumber daya manusia yang baik.

## PEMBAHASAN

### 1. Manajemen Sistem Informasi Desa dalam Kualitas Pelayanan Publik

Manajerial dan teknis. Jika dilihat dari fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan), terlihat bahwa keempat fungsi tersebut belum berjalan secara sinergis. Misalnya, perencanaan SID belum disusun dalam bentuk dokumen perencanaan yang matang, dan pengawasan terhadap penggunaan SID masih bersifat insidental, bukan bagian dari evaluasi berkala (Ralph M. Stair & George W. Reynolds, 2010).

Kontribusi SID terhadap kualitas pelayanan publik tampak melalui percepatan proses administrasi dan penyediaan layanan berbasis data. Hal ini sesuai dengan indikator kualitas pelayanan.

Sistem Informasi Desa (SID) telah disediakan sebagai platform terpadu untuk manajemen data desa, pengelolaan anggaran, publikasi informasi, serta pelayanan administrasi bagi Masyarakat (Khairullah Anshari et al., 2025). Literatur menunjukkan bahwa penggunaan SID sangat berpengaruh terhadap peningkatan tata kelola desa. Digitalisasi desa menjadi katalisator dalam mendorong pemerintahan yang responsif, efisien, dan transparan (Purwanto, 2020). Sementara itu, SID berkontribusi langsung terhadap peningkatan partisipasi warga, terutama dalam pengawasan penggunaan dana desa (Nugraha et al., 2022). Hal ini relevan dengan temuan Prasetyo yang menegaskan bahwa akses publik terhadap informasi anggaran memperkuat kepercayaan masyarakat dan menekan risiko penyimpangan administrasi (Prasetyo, 2019).

Dengan penguatan fungsi manajemen dan dukungan dari berbagai pihak, SID diharapkan dapat menjadi instrumen strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang modern, akuntabel, dan partisipatif.

Sejak kami mulai mengelola Sistem Informasi Desa (SID) secara lebih terstruktur, pelayanan publik di Desa Sepit terasa lebih cepat dan transparan. Warga sekarang bisa mendapatkan informasi administrasi seperti surat keterangan atau data kependudukan dengan lebih mudah karena semua data sudah terdigitalisasi. Kami juga bisa merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih akurat karena data di SID selalu kami perbarui. Bagi kami, SID sangat membantu dalam mengurangi antrean dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan desa.

### 2. Manajemen Sistem Informasi Desa dalam Transparansi Pemerintahan

Penerapan SID berkontribusi positif terhadap percepatan pelayanan publik, namun keterbatasan infrastruktur dan kompetensi SDM menjadi kendala utama dalam mewujudkan layanan yang responsif dan menyeluruh.

Di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang pesat, peran teknologi dan informasi dalam pembangunan desa semakin penting. Teknologi informasi memiliki potensi besar untuk mengubah wajah desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Apriyansyah et al., 2019). Sistem Informasi Desa (SID) adalah suatu sistem informasi yang mengembangkan pengelolaan data dan informasi di desa (Anggraeni & Irviani, 2017). Pada hasil penelitian, Arundini melakukan penelitian dengan judul Menurut Arif SID juga dapat membantu memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, karena memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dan saran dalam berbagai kegiatan pembangunan desa (Arif, 2016).

Dalam hal transparansi, meskipun SID sudah menyediakan fitur dan akses informasi publik, realitanya belum banyak masyarakat yang mampu atau terbiasa memanfaatkannya. Faktor rendahnya literasi digital dan kurangnya sosialisasi menjadi faktor penghambat. Secara keseluruhan, terdapat pengaruh positif manajemen SID terhadap kualitas pelayanan dan transparansi desa, namun diperlukan peningkatan kapasitas teknis, regulasi internal, serta pendekatan partisipatif masyarakat agar hasilnya optimal dan berkelanjutan.

Selain faktor internal seperti kompetensi perangkat desa dan kebijakan internal yang belum optimal, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dukungan infrastruktur teknologi informasi menjadi tantangan signifikan. Meskipun Desa Sepit telah memiliki perangkat keras dan jaringan internet, kualitas koneksi yang tidak stabil serta minimnya perawatan perangkat menyebabkan kinerja SID tidak maksimal. Misalnya, saat dilakukan observasi, sistem sempat tidak dapat diakses karena gangguan jaringan yang belum ditangani secara cepat. Hal ini menunjukkan perlunya dukungan teknis yang berkelanjutan agar pelayanan berbasis digital tidak terganggu.

### **3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penerapan SID**

Penggunaan SID belum terintegrasi dengan sistem pelayanan kabupaten. Artinya, meskipun SID di tingkat desa telah digunakan untuk pencatatan data kependudukan atau administrasi lainnya, proses validasi dan pelaporan ke instansi di atasnya masih dilakukan secara manual. Kondisi ini menciptakan duplikasi kerja, serta memperlambat aliran data dan informasi antara desa dan dinas terkait di kabupaten.

Masyarakat merasa puas dengan kecepatan pelayanan yang diberikan melalui SID namun mereka masih meragukan akurasi informasi yang tersedia. Hal ini dikarenakan minimnya pembaruan data secara berkala dan kurangnya transparansi terkait aktivitas anggaran desa. Beberapa warga menyatakan bahwa data kegiatan desa hanya tersedia dalam bentuk fisik atau diumumkan secara lisan di pertemuan warga. Ini menandakan bahwa fitur transparansi yang disediakan SID belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah desa.

Belum adanya mekanisme evaluasi dan pengawasan berkala terhadap pelaksanaan SID. Sistem berjalan tanpa ada audit teknologi atau laporan evaluasi periodik, yang semestinya menjadi dasar untuk perbaikan sistem. Tanpa adanya pengukuran kinerja, akan sulit mengetahui efektivitas jangka panjang dari penggunaan SID terhadap kualitas pelayanan publik dan transparansi desa.

Manajemen SID di Desa Sepit sudah berada di jalur yang tepat namun masih menghadapi berbagai kendala strategis dan operasional. Dibutuhkan kebijakan yang mendukung penguatan kapasitas SDM, penyediaan infrastruktur yang memadai, serta keterlibatan masyarakat yang lebih aktif dalam pemanfaatan sistem. Dengan pendekatan menyeluruh, SID bukan hanya menjadi alat administrasi, tetapi juga pendorong utama tata kelola desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Adanya kesenjangan antara kebijakan desa yang mendukung digitalisasi dengan implementasi di lapangan. Meskipun pemerintah desa telah menyediakan SID dan menetapkan aturan penggunaannya, namun belum ada regulasi internal yang mengatur kewajiban pembaruan data secara berkala oleh setiap perangkat desa. Hal ini menyebabkan inkonsistensi dalam pembaruan informasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem.

Selain itu, masih terdapat perbedaan tingkat pemahaman antara perangkat desa mengenai penggunaan SID. Beberapa perangkat yang lebih muda cenderung lebih cepat beradaptasi dengan teknologi, sedangkan perangkat yang lebih senior mengalami kesulitan dalam mengakses dan mengoperasikan sistem. Hal ini menunjukkan pentingnya pelatihan berkelanjutan dan pendekatan lintas generasi dalam manajemen teknologi informasi desa.

Dari sisi partisipasi masyarakat, kurangnya sosialisasi mengenai manfaat dan cara penggunaan SID menjadi faktor dominan yang membuat pemanfaatan sistem belum optimal. Dari sisi efisiensi pelayanan, penggunaan SID terbukti mempercepat proses administrasi desa. Namun demikian, kualitas pelayanan masih dipengaruhi oleh faktor-faktor non-teknis seperti sikap petugas, beban kerja, dan keterbatasan waktu. Ini menandakan bahwa teknologi hanyalah salah satu aspek dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, yang tetap harus didukung dengan tata kelola sumber daya manusia yang baik.

## KESIMPULAN

Manajemen Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Sepit sudah mulai diterapkan dalam pelayanan publik dan penyampaian informasi desa, meskipun belum sepenuhnya berjalan optimal. Penggunaan SID terbukti membantu mempercepat proses administrasi, namun masih terbatas pada fungsi-fungsi dasar dan sangat tergantung pada satu operator. Kualitas pelayanan publik mengalami peningkatan dari segi efisiensi waktu dan pencatatan administrasi, namun belum

sepenuhnya mampu meningkatkan aspek keandalan dan kenyamanan layanan karena keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi yang belum memadai. Transparansi desa melalui SID masih rendah. Masyarakat belum banyak memanfaatkan sistem ini untuk mengakses informasi terkait keuangan dan program kegiatan desa. Hal ini disebabkan oleh rendahnya literasi digital masyarakat dan minimnya sosialisasi dari pihak desa. Faktor penghambat utama dalam implementasi SID adalah kurangnya pelatihan bagi perangkat desa, ketergantungan pada satu operator, tidak stabilnya koneksi internet, serta belum adanya regulasi internal yang mengatur kewajiban pembaruan data secara berkala.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, E. Y., & Irviani, R. (2017). *Pengantar Sistem Informasi*. Lembaga Kita.
- Apriyansyah, A., Maullidina, I., & Purnomo, E. P. (2019). Efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) dalam Pelayanan Publik di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 10–24. <https://doi.org/10.31947/jakpp.v4i1.5901>
- Ardianus Laia, Aferiaman Telaumbanua, & Agnes Renostini Harefa. (2022). Analisis Pengelolaan Keuangan di Desa Angorudua Balaekha. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 1(2), 312–319. <https://doi.org/https://doi.org/10.56248/jamane.v1i2.47>
- Arif, F. (2016). Evaluasi Sistem Penggunaan Desa Sistem Jantung Terasi Partisipasi Para Masyarakat. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 34(2), 67–76.
- Eprilianto, D. F., Pradana, G. W., & Sari, Y. E. K. (2020). Digital Inovasi Sektor Publik: Efektivitas Kolaborasi dalam Implementasi Inovasi Dega Digital. *Jurnal EL-RIYASAH*, 10(2), 127. <https://doi.org/10.24014/jel.v10i2.8909>
- Gulo, K. E., & Kakisina, S. M. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi*, 2(1), 39–43.
- Khairullah Anshari, Devia Hetty Hernany, Amelia Puspita, Muhammad Amin Hafi, Rani Inayah, Muhammad Hafi, Masrifah, & Aji Rahadian. (2025). Optimalisasi Sistem Informasi Desa (SID) untuk Transparansi Anggaran dan Pelayanan Publik di Setda Kabupaten Banjar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(2), 10169–10173. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3633>
- Masri Ayu Ndruru, & Eduar Baene. (2022). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi*, 1(2), 275–285. <https://doi.org/https://doi.org/10.56248/jamane.v1i2.43>

- Mindarti, L. I., Saleh, C., & Galih, A. P. (2020). Pemberdayaan Pelayanan dan Tata Kelola Kearsipan di Kelurahan Merjosari Kota Malang. *J-Dinamika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 76–82. <https://doi.org/10.25047/j-dinamika.v5i1.1390>
- Nugraha, U., Iriani, Y., & Margana, R. R. (2022). Analisis Dampak Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) terhadap Tata Kelola Pemerintahan. *Jurnal Ilmiah Teknologi Infomasi Terapan*, 8(2). <https://doi.org/10.33197/jitter.vol8.iss2.2022.792>
- Prasetyo, A. (2019). Transparansi Anggaran Desa melalui Digitalisasi Informasi. *Jurnal Politik dan Kebijakan Publik*, 4(1), 50–66.
- Purwanto, E. (2020). Digitalisasi Desa Sebagai Katalis Pembaruan Tata Kelola Publik. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 7(2), 125–139.
- Ralph M. Stair, & George W. Reynolds. (2010). *Principles of Information Systems (9th ed.)*. Cengage Learning.
- Setyaningrum, C. A., & Wisnaeni, F. (2019). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 158–170. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.158-170>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.
- Supardi. (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. UII Press.
- Suterman Nazara, Emanuel Zebua, & Fatolosa Hulu. (2023). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Kerja Aparat Desa dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi*, 2(1), 10–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.56248/jamane.v2i1.62>
- Telaumbanua, A., & Ziliwu, N. (2022). Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi*, 1(1), 108–123. <https://doi.org/10.56248/jamane.v1i1.21>
- Wahyiah, I. R. (2026). Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Digital. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 15(1), 116–127. <https://doi.org/10.33592/jiia.v15i1.8513>
- Watrianthos, R., Nasution, A. P., & Syaifullah, M. (2019). Model e-Government Pemerintahan Desa. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 17(1), 53–60. <https://doi.org/10.34010/miu.v17i1.2239>
- Wibhisana, Y. P. (2021). Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas dalam Program Desa Wisata Jogoboyo Purworejo. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 12(1), 31–45. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v12i1.1741>